



News Title : Ekspor CPO Wajib Lewat Bursa Berjangka Komoditi	
Media Name : Kontan Harian	Journalist : Vendy Yhulia Susanto
Publish Date : 03 March 2023	Tonality : Positive
News Page : 14	News Value : 0
Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Kabul Wijayanto (Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)), Eddy Martono (Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI))	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Nasional	Topic : Aturan Izin Ekspor CPO

Ekspor CPO Wajib Lewat Bursa Berjangka Komoditi

Setiap aktivitas ekspor akan tercatat untuk penyusunan neraca komoditas CPO

Vendy Yhulia Susanto

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) dilakukan melalui bursa berjangka komoditi. Kebijakan itu akan diberlakukan paruh tahun ini.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemdag Didid Noordiatmoko mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain untuk menyiapkan kebijakan tersebut. Jika skema baru ini berjalan, izin ekspor CPO tetap di tangan Kemdag.

"Kami akan mengatur bahwa ekspor CPO akan diwajibkan melalui bursa berjangka. Ini strategi besarnya," ujar Didid, Kamis (2/3).

Didid menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memper-

baiki tata niaga CPO. Sebab, selama ini terdapat perbedaan data ekspor sawit. Perbedaan itu bisa mengakibatkan penerimaan negara dari ekspor CPO menjadi kurang optimal.

Selain buat mengoptimalkan penerimaan negara, kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka juga akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan neraca komoditas CPO. Sehingga, kelangkaan bahan baku CPO untuk minyak goreng tidak terulang kembali.

Ia mencontohkan, produksi CPO sekitar 50 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, kebutuhan domestik sekitar 23 juta ton. Berarti, maksimal ekspor yang bisa diizinkan adalah sekitar 27 juta ton.

"Bursa ini nanti akan membuat semacam mekanisme, sehingga yang bisa diberikan izin untuk ekspor tentu maksimal adalah 27 juta ton setahun," ucap Didid.

Untuk menarik minat eksportir, Bappebti akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor melalui bursa berjangka.

"Bisa insentif perpajakan,

Wajib ekspor CPO melalui bursa berjangka akan dimulai pada Juni 2023.

baik itu PPh maupun PPN, kemudian juga biaya transaksinya. Selama ini tidak ada tambahan (insentif) terkait dengan bursa," ujarnya.

Harga referensi

Lebih lanjut, ia menerangkan, saat ini baru ada dua bursa berjangka komoditi

yang telah memiliki izin. Keduanya adalah Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Kendati Kemdag menargetkan, bursa berjangka untuk CPO efektif pada Juni 2023, namun penentuan harga referensi atau acuan baru muncul sekitar satu bulan atau dua bulan setelah itu.

"Harapannya akhir tahun ini kita sudah memiliki harga acuan untuk CPO, tapi men-

capai harga acuan itu kita harus pastikan CPO itu masuk bursa (berjangka) di bulan Juni (2023)," jelas Didid.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabul Wijayanto berharap, adanya bursa berjangka CPO akan menciptakan transparansi harga dan data ekspor CPO. Transparansi itu akan mencerminkan harga tandan buah segar (TBS) yang sesungguhnya di lapangan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mendukung rencana penetapan harga acuan CPO di dalam negeri.

Menurut dia, dengan adanya harga acuan, maka bursa berjangka komoditi CPO akan berjalan maksimal. Transaksi perdagangan pun berpotensi lebih besar dari nilainya di saat ini. ■

Produksi dan Ekspor CPO 2019-2022 (Juta Ton)

Periode	Produksi	Ekspor
2019	47,18	29,55
2020	47,03	27,33
2021	46,88	33,67
2022	46,72	30,80

Sumber: GAPKI dan Riset KONTAN